

---

## Dinamika Ekonomi Konvensional: Kapitalisme Dan Sosialisme Dalam Perspektif

**Kustiawan<sup>1</sup>, Irdan Nurdiansyah<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Sekolah Tinggi Ekonomi Ekonomi Manajemen Bisnis Islam Bandung (STEMBI)

<sup>2</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Bisnis Syariah Al-Amin Tasikmalaya

\*Email: [kustiawanabdurrahman96@gmail.com](mailto:kustiawanabdurrahman96@gmail.com)

[Irdannurdiansyah27@gmail.com](mailto:Irdannurdiansyah27@gmail.com)

---

### Abstrak

Ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis merupakan dua sistem ekonomi utama yang memiliki perbedaan mendasar dalam pengelolaan sumber daya dan distribusi kekayaan. Kapitalisme berfokus pada kepemilikan pribadi dan mekanisme pasar, sementara sosialisme menekankan peran negara dalam mengatur ekonomi untuk mencapai kesejahteraan bersama. Studi ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menganalisis literatur dan data sekunder terkait kedua sistem ekonomi tersebut. Artikel ini membahas prinsip-prinsip dasar, keunggulan, serta kelemahan dari masing-masing system.

**Kata kunci:** Ekonomi Konvensional, Kapitalis, Sosialis

---

### Abstract

*Capitalist and socialist economies are two major economic systems with fundamental differences in resource management and wealth distribution. Capitalism emphasizes private ownership and market mechanisms, while socialism focuses on the role of the state in regulating the economy to achieve collective welfare. This study employs a qualitative descriptive approach by analyzing literature and secondary data related to these two economic systems. The article explores the fundamental principles, advantages, and weaknesses of each system.*

**Keywords:** *Conventional Economy, Capitalist Economy, Socialist Economy*

---

## 1. PENDAHULUAN

Dalam sejarah perkembangan ekonomi global, kapitalisme dan sosialisme telah menjadi dua pendekatan utama dalam mengatur sistem perekonomian. Kapitalisme mendominasi ekonomi dunia modern dengan prinsip pasar bebas, sementara sosialisme, dalam berbagai bentuk, tetap diterapkan di beberapa negara.

Kapitalisme berkembang pesat sejak era Revolusi Industri, di mana kepemilikan pribadi atas alat produksi dan mekanisme pasar menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Kemunculan kapitalisme membawa kemajuan signifikan dalam teknologi, inovasi, dan peningkatan produktivitas di banyak negara. Namun, di sisi lain, sistem ini juga memicu ketimpangan ekonomi yang signifikan, dengan kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin yang semakin melebar.

Copyright © 2023 The Authors. Published by Gunung Djati Conference Series This is an open access article distributed under the CC BY 4.0 license - <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Sebagai alternatif, sosialisme muncul sebagai respons terhadap ketimpangan yang ditimbulkan oleh kapitalisme. Sistem ini menekankan kepemilikan kolektif dan peran negara dalam mengatur distribusi sumber daya untuk menciptakan keadilan sosial. Sosialisme diterapkan dalam berbagai bentuk, mulai dari sosialisme demokratis yang menggabungkan mekanisme pasar dengan intervensi negara hingga sistem ekonomi yang sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah. Meski bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sosial, sosialisme menghadapi tantangan seperti inefisiensi, birokrasi yang berlebihan, dan keterbatasan dalam mendorong inovasi.

Dalam era globalisasi saat ini, banyak negara tidak sepenuhnya menganut satu sistem ekonomi secara mutlak, melainkan mengadopsi kombinasi elemen dari kedua sistem tersebut. Studi ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan utama antara kapitalisme dan sosialisme, serta mengidentifikasi dampaknya terhadap masyarakat dalam berbagai aspek, termasuk stabilitas ekonomi, kesenjangan sosial, dan keberlanjutan pembangunan.

## 2. METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan studi literature yang merupakan salah satu bentuk metode penelitian dengan mengumpulkan, membaca serta mencatat studi yang berkaitan dengan penelitian lalu data tersebut di olah sebagai dasar untuk membangun kerangka judul dengan kesatuan yang utuh. Sumber studi literatur ini diperoleh dari berbagai macam buku jurnal serta referensi lain yang dapat di gunakan dan terkait dengan dinamika ekonomi konvensional : Kapitalisme dan sosialisme dalam perspektif.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Ekonomi Kapitalis

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), istilah "kapitalisme" berasal dari dua kata, yaitu "kapital" dan "isme." Kata "kapital" merujuk pada modal, yang mencakup alat produksi seperti tanah dan uang, sedangkan "isme" mengacu pada suatu paham atau ajaran. Oleh karena itu, kapitalisme dapat diartikan sebagai sistem ekonomi atau politik yang berorientasi pada akumulasi kekayaan individu dengan campur tangan pemerintah yang minim. Secara umum, kapitalisme merupakan paham yang menekankan kepemilikan modal secara pribadi serta mendorong persaingan bebas dalam aktivitas ekonomi. (Muh Iqbal, Nindi Dwi Tetria Dewi, dan Helmi Syaifuddin 2023)

Berikut adalah para tokoh yang memiliki peran penting dalam sejarah pemikiran ekonomi kapitalis. Salah satu yang paling berpengaruh adalah Adam Smith, seorang filsuf dan ekonom asal Skotlandia yang sering disebut sebagai "Bapak Ekonomi Modern." Karyanya yang paling terkenal, *The Wealth of Nations*, diterbitkan pada tahun 1776 dan menjelaskan bagaimana mekanisme pasar bebas dapat menciptakan kesejahteraan ekonomi. Smith dikenal dengan konsep "tangan tak terlihat", yang menyatakan bahwa ketika individu berusaha mencapai kepentingan pribadi mereka, secara tidak langsung mereka juga berkontribusi terhadap

kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pengaruh pemikiran Adam Smith sangat luas dan menjadi dasar bagi banyak teori ekonomi modern. Hampir semua aspek dalam ekonomi memiliki keterkaitan dengan gagasan yang dikemukakannya. Namun, keberhasilannya tidak hanya terletak pada keaslian pemikirannya, tetapi juga pada kemampuannya dalam merancang sistem ekonomi yang kokoh. Sistem ekonomi yang dikembangkannya dikenal sebagai sistem ekonomi pasar, yang sering disebut sebagai sistem ekonomi liberal karena memberikan kebebasan penuh bagi individu dan pelaku ekonomi dalam mengejar kepentingan mereka sendiri. Sistem ini juga dikenal sebagai dasar dari ekonomi kapitalis. (Eka Sulistya Anggraeni 2024)

### 3.2 Prinsip Dasar Ekonomi Kapitalis

#### a. Kepemilikan Pribadi

Salah satu prinsip utama dalam sistem kapitalisme adalah hak individu untuk memiliki harta secara pribadi. Dalam sistem ini, kepemilikan tidak terkait dengan kewajiban sosial. Hak tersebut mendorong individu untuk mengelola sumber daya secara efisien dan memengaruhi distribusi pendapatan dalam masyarakat, di mana kepemilikan tersebut hanya menjadi hak individu yang bersangkutan.

#### b. Kebebasan dalam Aktivitas Ekonomi dan Persaingan

Setiap individu memiliki hak untuk mendirikan, mengelola, serta menjalankan bisnis sesuai dengan keinginannya. Mereka juga bebas terlibat dalam berbagai aspek bisnis demi mencapai keuntungan maksimal. Pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi kegiatan ekonomi demi memaksimalkan keuntungan, kecuali jika telah diatur dalam undang-undang yang berlaku.

#### c. Ketimpangan Ekonomi

Dalam sistem kapitalisme, modal menjadi faktor utama dalam proses produksi dan kebebasan ekonomi. Semakin besar modal yang dimiliki, semakin besar pula peluang individu untuk mencapai tujuan finansial dan meraih hasil yang lebih baik. Namun, perbedaan akses terhadap modal menciptakan ketimpangan, di mana kelompok kaya cenderung semakin kaya, sementara kelompok miskin semakin tertinggal.

#### d. Kepentingan Pribadi sebagai Prioritas

Kapitalisme didasarkan pada keyakinan bahwa tindakan individu dalam mengejar kepentingan pribadi akan memberikan manfaat bagi perekonomian suatu negara. Adam Smith menggambarkan prinsip ini dengan menyatakan bahwa manusia tidak mengandalkan kebaikan hati penjual, melainkan pada kepentingan mereka sendiri untuk memperoleh keuntungan. Pernyataan ini menegaskan bahwa kepentingan pribadi menjadi pendorong utama dalam interaksi ekonomi.

e. Mekanisme Pasar

Pasar berfungsi sebagai arena interaksi antara pembeli dan penjual, dengan peran utama mengalokasikan sumber daya secara efisien. Harga barang dan jasa ditentukan oleh keseimbangan antara permintaan dan penawaran, yang pada akhirnya berkontribusi pada terciptanya efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya.

f. Peran Pemerintah

Dalam sistem ekonomi kapitalis, peran pemerintah bersifat terbatas. Fungsi utamanya adalah menegakkan hukum dan menyediakan infrastruktur yang mendukung kelancaran pasar. Selain itu, pemerintah juga dapat menyediakan layanan publik tertentu, seperti pendidikan dan kesehatan, untuk memastikan kesejahteraan masyarakat. Pada akhirnya, keberlanjutan kapitalisme sangat bergantung pada kemampuan para pembuat kebijakan dan ekonom dalam menghadapi tantangan yang ada serta menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. (Moh Nasrul, Arief Setiawan, and Dewi Indrayani Hamin, 2024)

Sebagai contoh, dalam industri teknologi, kapitalisme telah menjadi pendorong utama inovasi dan persaingan, memungkinkan perusahaan untuk terus mengembangkan produk dan layanan canggih. Namun, perkembangan pesat ini juga memunculkan kekhawatiran terkait pelanggaran privasi data, praktik monopoli, dan penggantian tenaga kerja akibat otomatisasi. Oleh karena itu, pembuat kebijakan dihadapkan pada tantangan besar untuk mengatur industri ini secara bijak, sehingga dapat melindungi konsumen dan pekerja tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi serta inovasi.

Salah satu contoh nyata adalah Amazon, yang kerap menghadapi kritik terkait dominasi pasar dan praktik ketenagakerjaan. Meskipun perusahaan ini menunjukkan pertumbuhan dan inovasi yang pesat, Amazon dituding mengeksploitasi pekerja melalui upah rendah dan kondisi kerja yang tidak layak, menimbulkan kekhawatiran terhadap dampak negatif kapitalisme yang tidak terkendali terhadap hak-hak tenaga kerja. Selain itu, dominasi Amazon dalam sektor e-commerce juga memunculkan isu antitrust, karena dianggap menghambat persaingan dan merugikan bisnis kecil. (Nasrul, Setiawan, and Hamin, 2011)

### 3.3 Kelebihan Ekonomi Kapitalis

a. Kebebasan Ekonomi Memberikan Manfaat Besar

Pendukung sistem ekonomi kapitalis percaya bahwa kebebasan dalam kegiatan ekonomi dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat. Prinsip ini dikenal sebagai "dasar hukum" dalam perekonomian dan menekankan bahwa produktivitas masyarakat akan meningkat jika prinsip tersebut diterapkan secara menyeluruh. Hal ini berpotensi meningkatkan kesejahteraan nasional dan mendorong distribusi kekayaan yang lebih merata. Selain itu, kapitalisme juga memberikan kebebasan kepada individu untuk menentukan jalur karier, mendirikan usaha, dan berinvestasi.

b. Fokus pada Keuntungan dan Pertumbuhan Ekonomi

Para ekonom kapitalis berpendapat bahwa tujuan utama sistem ini adalah memperoleh keuntungan sekaligus meningkatkan produksi. Ketika peluang keuntungan semakin kecil, dorongan untuk bekerja keras dan meningkatkan produksi cenderung menurun. Sebaliknya, jika individu memiliki motivasi tinggi untuk meraih keuntungan, mereka akan berusaha secara maksimal dalam memproduksi. Sistem ini mendorong individu dan perusahaan untuk terus mencari keuntungan, yang pada gilirannya meningkatkan investasi, inovasi, serta produktivitas. Semua ini berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

c. Kebebasan Ekonomi Meningkatkan Kesejahteraan

Pendukung kapitalisme percaya bahwa kebebasan dalam kegiatan ekonomi memberikan manfaat yang luas bagi individu. Mereka menganggap kebebasan ekonomi sebagai "fondasi hukum" dalam perekonomian dan meyakini bahwa penerapan prinsip ini secara bebas akan memperkuat aktivitas ekonomi di masyarakat. Selain meningkatkan kesejahteraan negara, sistem ini juga diyakini dapat menciptakan distribusi kekayaan yang lebih adil. Kapitalisme membuka peluang mobilitas sosial, memungkinkan individu meningkatkan taraf hidup mereka melalui kerja keras dan ketekunan. Dibandingkan dengan sistem ekonomi lainnya, kapitalisme dianggap lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi, efisiensi, dan peningkatan standar hidup.

### 3.4 Kekerangan Ekonomi Kapitalis

a. Ketimpangan Distribusi Kekayaan

Persaingan dalam pasar bebas yang tidak terkendali dapat membawa dampak negatif bagi masyarakat, terutama dalam hal kesempatan kerja dan stabilitas ekonomi. Kebebasan individu untuk memiliki kekayaan tanpa batas berisiko menciptakan akumulasi kekayaan yang berlebihan di tangan segelintir orang, yang pada akhirnya menyebabkan distribusi kekayaan menjadi tidak merata. Ketimpangan ini dapat melemahkan sistem ekonomi secara keseluruhan. Selain itu, persaingan yang ketat sering kali menyulitkan usaha kecil untuk bertahan, sementara perusahaan besar semakin mendominasi pasar.

b. Meningkatkan Ketimpangan Sosial dan Konflik

Persaingan bebas dalam kapitalisme dapat memicu persaingan yang tajam di masyarakat, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan bersama. Ketika hanya segelintir orang menguasai kekayaan, mereka cenderung memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi tanpa memperhatikan kesejahteraan masyarakat secara luas. Akibatnya, kelompok miskin mungkin mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi. Selain itu, sistem ini dapat membuka peluang terjadinya eksploitasi tenaga kerja, seperti pemberian upah rendah dan kondisi kerja yang tidak layak. Tidak hanya

itu, aktivitas ekonomi yang tidak berkelanjutan juga berisiko menimbulkan kerusakan lingkungan.

c. Ketidakseimbangan Dalam Sistem Ekonomi

Kapitalisme menempatkan kendali manajemen dan distribusi kekayaan di tangan para pelaku ekonomi, yang sering kali tidak memprioritaskan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Akibatnya, aliran kekayaan menjadi tidak merata, di mana hanya segelintir individu yang menikmati manfaat utama, sementara pekerja dan faktor produksi lainnya sering kali tidak memperoleh keuntungan yang adil. Selain itu, kurangnya regulasi pemerintah dapat menyebabkan munculnya eksternalitas negatif, seperti ketimpangan antara sektor konsumsi dan investasi, yang pada akhirnya berpotensi memicu krisis ekonomi.

### 3.5 Ekonomi Sosialis

Sebelum membahas lebih jauh tentang makna sosialisme, penting untuk memahami sejarah munculnya gerakan ini. Salah satu pelopor gerakan sosialisme dalam konteks agama adalah Abu Dzar Al-Ghifary, yang pada tahun 652 M (32 H) mulai menginisiasi gagasan sosialisme berbasis nilai-nilai agama di tengah masyarakat Islam. Beberapa abad kemudian, gerakan sosialisme juga muncul di dunia Barat dengan tokoh-tokoh seperti Karl Marx dan Friedrich Engels. Meskipun kedua gerakan ini memiliki beberapa kesamaan dalam tujuan, terdapat perbedaan mendasar antara keduanya. Gerakan yang dirintis oleh Abu Dzar Al-Ghifary berlandaskan pada nilai-nilai agama, sedangkan gerakan sosialisme Barat lebih berfokus pada persoalan duniawi, materi, dan finansial tanpa kaitan dengan agama atau ketuhanan. (Ikbal, Dewi, and Syaifuddin, 2016).

Secara etimologis, sosialisme berasal dari kata "sosial," yang berarti masyarakat, dan merupakan konsep yang berlawanan dengan individualisme. Karl Marx (1818–1883) mengembangkan sosialisme sebagai bentuk perlawanan terhadap kapitalisme (Kamil, 2016: 24). Sosialisme muncul sebagai hasil dari pengaruh Revolusi Prancis dan Revolusi Industri di Inggris, yang terjadi pada akhir abad ke-18 hingga akhir abad ke-19. Prinsip utama sosialisme tidak hanya menempatkan produksi di bawah kendali negara, tetapi juga menuntut negara untuk memainkan peran sentral dalam pengelolaan ekonomi. (Muhammad Sharif Chaudhry 2019).

Secara terminologis, sosialisme merujuk pada sistem atau teori ekonomi di mana alat produksi, distribusi, dan pertukaran dikelola secara kolektif oleh masyarakat melalui peran negara. Sosialisme sering dianggap sebagai tahap transisi dari kapitalisme menuju komunisme, dengan karakteristik utama berupa distribusi pendapatan yang didasarkan pada kerja, bukan kebutuhan.

Beberapa ciri khas sosialisme meliputi:

- a. Kepemilikan publik atau negara atas seluruh alat produksi, distribusi, dan pertukaran.

- b. Penghapusan kepemilikan pribadi atau swasta.
- c. Kesetaraan ekonomi serta pemenuhan kebutuhan dasar bagi seluruh warga negara.
- d. Penekanan pada materialisme dengan fokus utama pada faktor ekonomi.
- e. Sistem pemerintahan yang totaliter dengan penerapan kediktatoran proletariat. (Amri 2010)

### 3.6 Prinsip Dasar Ekonomi Sosialis

- a. **Kepemilikan Bersama**  
Sumber daya alam, alat produksi, dan modal dimiliki serta dikelola secara kolektif oleh masyarakat atau negara, bukan oleh individu atau perusahaan swasta.
- b. **Perencanaan Terpusat**  
Pengaturan produksi, alokasi sumber daya, dan distribusi barang serta jasa dilakukan oleh pemerintah atau lembaga perencana ekonomi, bukan melalui mekanisme pasar bebas.
- c. **Distribusi yang Merata**  
Tujuan utama sistem ini adalah memastikan pemerataan kekayaan dan manfaat ekonomi di seluruh lapisan masyarakat, dengan prioritas pada pemenuhan kebutuhan dasar.
- d. **Fokus pada Kesejahteraan Sosial**  
Perekonomian diarahkan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pokok, seperti tempat tinggal, pendidikan, layanan kesehatan, serta penyediaan lapangan kerja yang layak bagi seluruh masyarakat.
- e. **Partisipasi Demokratis**  
Keputusan ekonomi dibuat melalui mekanisme demokratis yang melibatkan masyarakat luas dalam proses pengambilan kebijakan.
- f. **Pengendalian Harga dan Produksi**  
Pemerintah atau badan perencana ekonomi bertanggung jawab dalam mengatur harga serta jumlah produksi untuk menghindari ketimpangan ekonomi dan menjaga stabilitas perekonomian.

Sebagai contoh, di negara-negara dengan pemerintahan berorientasi sosialisme seperti Swedia, pajak yang tinggi digunakan untuk membiayai layanan kesehatan dan pendidikan universal. Hal ini memungkinkan semua warga negara mengakses layanan penting tanpa memandang tingkat pendapatan. Selain itu, regulasi di negara-negara ini cenderung lebih menitikberatkan pada perlindungan hak pekerja dan pelestarian lingkungan, daripada sekadar mengejar keuntungan perusahaan. Pendekatan ini berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan. (Nasrul, Setiawan, and Hamin 2024).

Namun, sistem ini juga mendapat kritik, terutama karena tingginya pajak yang diperlukan untuk mendukung program sosial dapat mengurangi motivasi individu dan inovasi. Pajak yang tinggi dapat membuat orang kurang terdorong untuk bekerja keras atau mengambil risiko, karena

sebagian besar pendapatan mereka dikenakan pajak. Selain itu, intervensi pemerintah yang berlebihan sering kali dianggap dapat menyebabkan ketidakefisienan dan menurunkan daya saing industri. Akibatnya, hal ini berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi dan menurunkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. (Nasrul, Setiawan, and Hamin 2024)

### 3.7 Kelebihan Ekonomi Sosialis

- a. Sistem ekonomi sosialis berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar bagi seluruh masyarakat, seperti tempat tinggal, pendidikan, dan layanan kesehatan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial secara menyeluruh dengan memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan pokok, seperti makanan, pakaian, fasilitas kesehatan, dan tempat tinggal.
- b. Kepentingan sosial lebih diutamakan dibandingkan kepentingan individu atau kelompok kecil. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih fokus pada tujuan kolektif, seperti pembangunan sosial dan ekonomi. Setiap individu dijamin memperoleh pekerjaan, sementara mereka yang memiliki keterbatasan fisik atau mental akan mendapatkan perhatian dan bantuan dari negara.
- c. Produksi dan distribusi barang diatur secara terencana oleh pemerintah, sehingga dapat menghindari masalah kelebihan atau kekurangan produksi yang kerap terjadi dalam sistem kapitalis. Perencanaan ekonomi yang terpusat serta pengendalian harga dan produksi membantu menciptakan stabilitas ekonomi dengan mengurangi fluktuasi harga dan tingkat pengangguran.
- d. Sistem ekonomi sosialis memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan ekonomi melalui mekanisme demokratis. Hal ini meningkatkan legitimasi serta akuntabilitas pemerintah. Seluruh produksi dikendalikan oleh negara, dan keuntungan yang diperoleh digunakan untuk kepentingan masyarakat secara luas.

### 3.8 Kekurangan Ekonomi Sosialis

- a. Kurangnya insentif bagi individu untuk berinovasi dan meningkatkan produktivitas dapat menjadi hambatan dalam pertumbuhan ekonomi. Tanpa dorongan untuk memperoleh keuntungan pribadi, motivasi kerja dapat menurun. Selain itu, kebebasan individu dalam memiliki dan mengelola kekayaan juga dibatasi, sehingga negosiasi atas hak-hak pribadi menjadi sulit dilakukan.
- b. Sistem ekonomi sosialis menolak prinsip individualisme dan membatasi wewenang individu, yang dapat menghambat kebebasan berpikir serta bertindak. Hal ini menyebabkan sistem ekonomi ini cenderung otoriter, di mana buruh dianggap sebagai bagian dari sistem produksi yang harus bekerja terus-menerus layaknya mesin.



- c. Fokus utama ekonomi sosialis adalah faktor ekonomi, sementara aspek pendidikan moral individu sering kali diabaikan. Jika pemenuhan kebutuhan materi menjadi prioritas utama tanpa memperhatikan nilai-nilai moral, maka masyarakat dapat terfragmentasi. Dalam kondisi ini, kekuasaan bisa berpindah ke tangan kelompok pekerja (proletariat) yang mungkin kurang memiliki pendidikan dan wawasan luas, sehingga meningkatkan risiko penindasan, kediktatoran, dan konflik sosial.
- d. Untuk mencapai tujuan ekonomi, sistem sosialis menerapkan berbagai aturan ketat yang dapat menghambat perkembangan individu dalam aspek moral dan keterampilan pribadi. Akibatnya, sistem ini cenderung kurang memberikan ruang bagi kebebasan individu dalam mencapai potensi maksimalnya.

### 3.9 Kapitalisme di Indonesia

Untuk menentukan apakah suatu negara memiliki sistem ekonomi kapitalis atau sosialis, indikator yang paling sederhana adalah melihat pihak yang lebih dominan dalam mengendalikan sektor ekonomi. Jika sebagian besar sektor ekonomi dikuasai oleh pihak swasta, negara tersebut cenderung menerapkan sistem kapitalisme. Sebaliknya, jika sektor ekonomi lebih banyak dikendalikan oleh pemerintah, sistem yang diterapkan lebih mengarah pada sosialisme. Berdasarkan tolok ukur ini, kita dapat menganalisis sejauh mana pengaruh kapitalisme telah berkembang di Indonesia.

Indonesia tidak sepenuhnya menerapkan sistem ekonomi kapitalis, melainkan mengadopsi sistem Demokrasi Ekonomi. Sistem ini didasarkan pada Pasal 33 UUD 1945, yang menekankan prinsip perekonomian berbasis kekeluargaan dan kebersamaan, dengan koperasi sebagai bentuk usaha yang dianggap paling sesuai. Dalam sistem ini, negara mengakui keberadaan tiga jenis badan usaha, yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), badan usaha swasta, dan koperasi.

Namun, pada periode 1983-1988, pemerintah mulai menerapkan deregulasi ekonomi, terutama dalam mekanisme pasar. Kebijakan ini dipicu oleh penurunan drastis penerimaan dari sektor minyak dan gas (migas), yang mendorong perlunya peningkatan tabungan swasta untuk memulihkan perekonomian. Sebagai langkah awal, pemerintah memberikan kemudahan dalam proses pendirian bank.

Sejak saat itu, mekanisme pasar semakin dianggap sebagai cara paling efisien dalam mengelola perekonomian, dengan campur tangan pemerintah yang semakin minim. Investor asing mulai berdatangan berkat berbagai fasilitas dan kemudahan yang diberikan kepada sektor swasta untuk mengelola sumber daya alam Indonesia. Akibatnya, banyak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diprivatisasi, sementara sektor perbankan mengalami restrukturisasi, yang mendorong pertumbuhan pesat bank-bank swasta.

Sayangnya, keterlibatan politik dan kekuasaan dalam perekonomian sering kali memunculkan praktik yang tidak sehat, termasuk persaingan tidak adil dan penyalahgunaan wewenang.

Selain itu, peran besar konglomerat dalam menggerakkan perekonomian berpotensi memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi.

### 3.10 Sosialisme di Indonesia

Meskipun Indonesia tidak menerapkan sistem ekonomi sosialis, ideologi komunisme pernah masuk ke Indonesia, terutama pada era sebelum dan awal Orde Baru. Gagasan komunisme pertama kali diperkenalkan oleh Hendrikus Josephus Fransiscus Marie Sneevliet, seorang warga Belanda yang pada tahun 1913 mendirikan organisasi *Indische Social Democratische Vereeniging* (ISDV).

Awalnya, *Indische Social Democratische Vereeniging* (ISDV) tidak berhaluan komunis. Namun, setelah terjadinya Revolusi Rusia, organisasi ini mulai mengadopsi pandangan radikal dan melakukan infiltrasi ke dalam organisasi massa, termasuk Sarekat Islam. Akibatnya, terjadi perpecahan dalam Sarekat Islam menjadi SI Merah dan SI Putih. SI Merah kemudian berkembang menjadi cikal bakal Partai Komunis Indonesia (PKI), yang didirikan secara diam-diam pada tahun 1917.

Dalam buku *Bung Hatta Menjawab*, Mohammad Hatta menyebut bahwa Sarekat Islam yang dipimpin oleh Samaun dan Darsono kurang memberikan perhatian pada nasib kaum buruh. Hal ini membuka peluang bagi penyebaran ide-ide radikal yang dipengaruhi oleh Hendrikus Josephus Fransiscus Marie Sneevliet.

PKI beberapa kali berusaha menggulingkan pemerintahan, termasuk melalui pemberontakan pada tahun 1926, 1948, dan 1965, namun semua upaya tersebut berakhir dengan kegagalan. Setelah peristiwa G30S/PKI pada tahun 1965, pengaruh komunisme di Indonesia melemah secara signifikan dan dinyatakan terlarang, baik dalam bentuk pemikiran maupun gerakan politik.

### 4.1 SIMPULAN

Ekonomi kapitalis menekankan kepemilikan pribadi atas alat produksi, kebebasan beraktivitas ekonomi, serta persaingan bebas sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Prinsip-prinsip dasar kapitalisme, seperti mekanisme pasar dan peran pemerintah yang terbatas, mendorong inovasi dan efisiensi dalam perekonomian. Namun, sistem ini juga memiliki kelemahan, seperti ketimpangan sosial dan ekonomi. Kekayaan cenderung terakumulasi di tangan segelintir individu, sementara kelompok yang kurang beruntung menghadapi keterbatasan akses terhadap sumber daya.

Sebaliknya, ekonomi sosialis menitikberatkan kepemilikan kolektif atas alat produksi, perencanaan terpusat oleh pemerintah, dan distribusi kekayaan yang lebih merata. Sistem ini bertujuan untuk menjamin kesejahteraan sosial dengan menyediakan layanan publik, seperti kesehatan dan pendidikan, bagi seluruh masyarakat. Namun, sistem ini juga memiliki kelemahan, seperti

minimnya insentif bagi individu untuk berinovasi dan rendahnya efisiensi ekonomi akibat kontrol yang berlebihan dari pemerintah.

Indonesia tidak sepenuhnya menganut sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis, melainkan menerapkan Demokrasi Ekonomi yang berlandaskan prinsip kekeluargaan dan kebersamaan. Namun, sejak deregulasi ekonomi pada tahun 1980-an, kapitalisme semakin berkembang di Indonesia, ditandai dengan meningkatnya peran sektor swasta dan masuknya investasi asing. Akibatnya, sektor ekonomi yang sebelumnya dikendalikan oleh negara kini semakin banyak dikelola oleh swasta. Perubahan ini memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memicu peningkatan ketimpangan sosial.

Meskipun sosialisme tidak diadopsi sepenuhnya, gagasan sosialis pernah masuk ke Indonesia, terutama pada era Orde Baru. Beberapa kebijakan ekonomi juga mencerminkan pengaruh sosialisme, seperti peran negara dalam mengendalikan sektor-sektor strategis dan upaya pemerataan kesejahteraan. Namun, hingga saat ini, Indonesia tetap menganut sistem ekonomi campuran yang mengombinasikan prinsip kapitalisme dan sosialisme untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan sosial.

#### REFERENSI

- Ikbal Muh, Nindi dwi Tetria Dewi, and Helmi Syaifuddin, (2023) '*Problematika Ekonomi Kapitalis Dan Sosialis Perspektif Ismail Raji Al-Faruqy*', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9.01 pp. 1197–1203
- Anggraeni Sulistya Eka (2024) '*Tinjauan Perbedaan Sistem Ekonomi : Ekonomi Kapitalis , Ekonomi Sosialis , Dan Ekonomi Islam*', *Economic and Business Management International Journal*, 6.2, pp. 63–76.
- Nasrul Moh Setiawan Arief, and Hamin Indrayani Dewi (2024) '*Perbandingan Sistem Ekonomi Sosialisme , Kapitalisme , Dan Ekonomi Syariah : Sebuah Analisis Kritis Terhadap Prinsip , Implementasi , Dan Dampak Sosial*', 7.2 pp. 1011–24.
- Nasrul Moh Setiawan Arief, and Hamin Indrayani Dewi (2024) '*Perbandingan Sistem Ekonomi Sosialisme , Kapitalisme , Dan Ekonomi Syariah : Sebuah Analisis Kritis Terhadap Prinsip , Implementasi , Dan Dampak Sosial*', 7.2 pp. 1012–25.
- Ikbal, Dewi, and Syaifuddin, 2016 '*Problematika Ekonomi Kapitalis Dan Sosialis Perspektif Ismail Raji Al-Faruqy*'
- Chaudhry Sharif Muhammad (2019) Dalam *Karyanya Fundamental of Islamic Economic System.*, *Kelemahan Sistem Ekonomi Kapitalisme Dan Sosialisme Menurut Muhammad Sharif Chaudhry Dalam Karyanya Fundamental of Islamic Economic System.*, 2 pp. 1– 16
- Amri, (2010) '*Kelemahan Sist. Ekon. Kap. Dan Sosial. Menurut Muhammad Sharif Chaudhry Dalam Karyanya Fundam. Islam. Econ. Syst.*
- Nasrul, Setiawan, and Hamin, (2024) '*Perbandingan Sistem Ekonomi Sosialisme , Kapitalisme , Dan Ekonomi Syariah : Sebuah Analisis Kritis Terhadap Prinsip , Implementasi , Dan Dampak Sosial*'